

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka Setia, Surakarta.  
h. 109- 111.
- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, 1986, Bandung:  
Alumni, hal. 5
- Bayu Surya Ningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, 1992, Jakarta: Rineka Cipta,  
hal. 11.
- Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), halaman.  
15.
- C. Djamabut Blaang, *Perumahan dan Pemukiman Sebagai Kebutuhan Pokok*,  
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), Hlm. 4.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi  
Aksara, 2003), halaman. 1.
- C.S.T kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,  
2000), h. 91
- Eko Budiharjo, *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*, (Bandung: Alumni,  
2009).
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2003, Jakarta: Gramedia Pustaka  
Utama, hal. 21.
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, 2007, Jakarta: Kelapa Gading  
Permai, hal. 24.
- Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru: Cendikia Insani, 2006), h. 46
- Rasyid Ryaas, *Otonomi Daerah Dalam Kesatuan*, (Yogyakarta: Kerjasama  
Pustaka Pelajar (dan) Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan,  
2002).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2001, Yogyakarta: UII Press, hal. 4-5.
- Riyaas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan  
Kepemimpinan*, 2002, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia, hal. 59
- Riyaas Rasyid, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*, 1997,  
Jakarta: Yarsif Watampone, hal. 99.
- S.F Marbun dan Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, 1987,  
Yogyakarta: Liberty, hal. 5.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm 13-14.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), halaman. 52.
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, 2003, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 6.
- Taliziduhu Ndraha, *Ilmu Pemerintahan Jilid I*, 2000, Jakarta: BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD, hal. 78.
- Urip Santoso, *Hukum Perumahan*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm 3.

## 2. JURNAL

- Annisa. B, "Pengaruh Peningkatan Kawasan Permukiman Terhadap Perubahan Suhu Di Kabupaten Bekasi Pada Tahun 2009 - 2019", *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021, Hal. 1
- Bitta Pigawati dan Iwan Rudiarto, "Penggunaan Citra Satelit Untuk Kajian Perkembangan Kawasan Permukiman Di Kota Semarang", *Jurnal, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang*, (Forum Geografi: 2011), hal. 14
- Latif, M.B. and Wisnu Setiawan, S.T. (2020). Penataaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Semanggi Dengan Konsep Urban Sustainable Settlement. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah. Hlm. 6
- M. Rizky Akbar dan Nina Novira, "Analisis Penanganan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Medan Denai", *Jurnal Tunas Geografi*. Vol. 8, No. 1. Hal.63-65
- Nalahudin, M., Hasanbasri, M. (2010) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perawat di Puskesmas Melati Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hlm. 12
- Nia Kurniati. (2014). Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No.1. Hlm 1.
- Retno Wijayanti, Atang Sutandi, dan Andrea Emma Pravitasari, "Identifikasi Spasial Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh Di Kota Bekasi", *Jurnal Tataloka*. Vol. 22, No. 4. Hal 578

- Rusman. S, “Studi Kawasan Permukiman Berbasis GIS Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”, *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2018, hal. 2
- Santosa EB, Therik LV. 2016. Faktor Penentu Bertempat Tinggal pada Kawasan Kumuh di Kota Malang. *Jurnal Tataloka* 18(4):261-273.
- Sulestianson E, Indrajati PN. 2013. Penanganan Permukiman Kumuh dengan Pendekatan Karakteristik dan Faktor Penyebab Kekumuhan (Studi Kasus: Permukiman Kumuh di Kelurahan Tamansari dan Kelurahan Braga. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota BSAPPK* 3(2):261-270.
- Suharto, E. (2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 11.
- Widiarto, Eko, 2012, Monitoring Dan Evaluasi Kepatuhan System Manajemen Mutu Pelaksanaan Jalan Kabupaten Halmahera Timur, Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Widyasari Her Nugrahandika, Retno Widodo Dwi Pramono. (2018). Lokalitas Pengaturan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di DIY: Tipologi Permasalahannya. Seminar Nasional Space, Mercubuana. Vol. 3, No. 1. Hlm. 1-2

### **3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

#### **4. SUMBER LAIN**

Admindpu. Rumah, Perumahan, Permukiman  
<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/52/rumah-perumahan-dan-permukiman>  
diakses pada tanggal 31 Oktober 2022

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-23,  
<https://disperkimtan.bekasikota.go.id/> diakses pada tanggal 27 April 2023